

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSAT KONSELING ANAK DAN REMAJA DI SURABAYA

RIO FEBRIANNUR RACHMAN

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang

Email: riofrachman21@gmail.com

Abstract: There are many steps taken by the City Government of Surabaya to solve the problems of children and adolescents. This article focuses on discussing how the counseling center, which aims to address these problems, provides concrete services in the community. This discussion uses public policy theory and the principle of sustainable social development that is agreed internationally by countries in the world. The method used is qualitative, with a literature review approach. The results of the study indicate that the policies of the counseling center for children and adolescents, in line with universal Islamic and humanist values. However, there must be improvements to the program mechanism as the demands of the situation nowadays.

Keywords: Counseling, Children and Adolescent, Public Policy

Abstrak: Ada banyak langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk memecahkan persoalan anak dan remaja. Artikel ini fokus membahas tentang bagaimana kebijakan pengadaan pusat konseling, yang bertujuan untuk menjawab problematika tersebut, memberi pelayanan kongkret di masyarakat. Diskusi ini bersentuhan dengan teori kebijakan publik dan azas pembangunan sosial berkelanjutan yang disepakati secara internasional oleh negara-negara di dunia. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan kajian pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya keselarasan kebijakan pusat konseling anak dan perempuan di Surabaya dengan nilai-nilai Islami dan humanis universal. Meski demikian, mesti ada pemberahan-pemberahan mekanisme program sebagai tuntutan keadaan di era kekinian.

Kata Kunci: Konseling, Anak dan Remaja, Kebijakan Publik

A. Pendahuluan

Salah satu persoalan yang membelit kota besar, termasuk di Surabaya, adalah problematika anak dan remaja. Hal itu dibuktikan dari maraknya informasi mengenai masalah anak dan remaja, baik yang berhubungan dengan kenakalan, bahkan yang berhubungan dengan tindak pidana¹. Fenomena itu tak kepas dari kenyataan bahwa anak dan remaja memiliki tingkat kematangan pikiran yang belum stabil. Sehingga, mereka membutuhkan bimbingan atau arahan penuh dari orangtua, sedangkan bagi yang tengah menghadapi masalah khusus, akan memerlukan konseling dari ahlinya.

Konseling bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi antar pribadi secara intensif². Harapannya, anak dan remaja yang menerima konseling dari ahlinya, yang kemudian dikenal sebagai konselor, dapat memeroleh pencerahan³. Muaranya, ketidakstabilan pemikiran yang dimiliki mereka, tidak berujung pada kenakalan atau tindak

pidana yang malah merugikan diri sendiri serta orang lain.

Konselor mesti memiliki keahlian serta keterampilan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, diskusi bersama klien, dalam hal ini anak dan remaja, dapat memeroleh hasil maksimal. Tidak justru menemui jalan buntu yang malah bisa berakibat pada tekanan bagi klien yang dimaksud⁴.

Dulu, sekitar awal abad 20, pekerjaan konselor berada di tangan para guru di sekolah, yang memberikan pelayanan informasi, bimbingan kepribadian, kondisi sosial, proyeksi karir serta pendidikan⁵. Saat ini, konselor tidak lagi hanya dikenal sebagai mereka yang berprofesi sebagai guru. Konselor tidak hanya ada di sekolah dengan status guru BK (bimbingan konseling). Namun juga, berada di luar sekolah, baik yang berstatus psikolog maupun konsultan. Perkembangan teknologi, ilmu psikologi, kesehatan, dan tuntutan zaman, sudah membuat profesi konseling juga mengalami pertumbuhan⁶.

¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 101-103.

²Arintoko, Wawancara Konseling Di Sekolah, (Yogyakarta: ANDI, 2011), hal. 1.

³Farid Mashudi, *Psikologi Konseling*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hal. 19.

⁴Anthony Yeo, *Konseling, Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah*, (Jakarta: Libri, 2010), hal. 56.

⁵Syamsul Yusuf, *Konseling Individual, Konsep Dasar & Pendekatan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 3.

⁶Fitriana, H. *Peran Keterampilan Konselor (Counselor Skill) Sebagai Problem Solving Pada*

Problem yang makin beragam, yang dihadapi anak dan remaja di era kekinian, membuat Pemerintah Kota Surabaya menciptakan terobosan. Secara khusus, eksekutif di Kota Pahlawan membuka Pusat Konseling khusus bagi anak dan remaja. Yang dalam perkembangannya, juga terbuka untuk para perempuan dan mereka yang mengalami persoalan rumah tangga.

Pusat konseling itu dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) dengan nama SEMANGGI SUROBOYO (puSat pEMbelajAraN keluarGa sejahtera dan bahaGIa SUROBOYO). Seperti jamak dipahami, konseling adalah usaha memberikan bantuan pada individu yang bermasalah dalam hidup⁷. Begitulah pula tugas pokok dari pusat konseling ini, yang berupaya menyuguhkan solusi bagi warga yang berhadap dengan problem ekonomi, sosial, rumah tangga, dan lain sebagainya. Secara khusus, fokus utama dari pusat konseling ini adalah anak dan remaja. Apalagi, pembentukan pusat

konseling ini merupakan tindak lanjut untuk mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak, yang diresmikan pada 2017 silam dan berlokasi di Gedung Siola Jalan Tunjungan Surabaya⁸.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini merupakan bentuk kehadiran negara di masyarakat, untuk menghadapi tantangan yang ada. Indonesia terbentuk dengan semangat mensejahterakan warga. Sehingga, pemerintah baik di level pusat maupun daerah, mestilah membuat kebijakan inovatif agar kualitas Sumber Daya Manusia di negeri ini dalam kondisi prima⁹. Keberadaan pusat konseling anak dan remaja merupakan sebuah langkah konkret untuk merealisasikan cita-cita tersebut secara berkelanjutan.

Ada sejumlah tujuan konseling. Antara lain, terjadi perubahan perilaku pada klien yang sebelum melakukan hal yang kurang diharapkan. Selain itu, terjadi kebugaran di aspek mental, munculnya solusi atas masalah, dan

Permasalahan Remaja (Studi Literatur). Al-Tazkiah, 8(1), 17-28., 2019

⁷Syamsul Yusuf, *Konseling Individual, Konsep Dasar & Pendekatan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 23.

⁸Surabaya.go.id. 2017. Resmikan Puspaga dan Convention Hall, Walikota Ajak Anak-anak Curhat Agar Terhindar Narkoba, tersedia di <https://www.surabaya.go.id/id/berita/24223/resmikan-puspaga-dan-convention> diakses pada 25 Agustus 2019

⁹Prayitno Dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013), hal. 3.

meningkatnya kualitas personal dari klien. Tujuan itu pula yang menjadi keinginan dari keberadaan pusat konseling anak dan remaja di Surabaya, yakni, menjadi media terciptanya pribadi dan kehidupan yang jauh lebih bermutu bagi para klien.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, pusat konseling anak dan remaja ini berkoordinasi dengan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) yang berada di tiap kecamatan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT2PA). Konsentrasi pusat konseling ini secara umum memang keluarga, juga perempuan dalam rumah tangga. Dengan asumsi, apabila keluarga dalam kondisi baik, dan perempuan di rumah tangga tidak mengalami tekanan mental, anak dan remaja di dalam keluarga itu pasti mendapat perhatian yang baik¹⁰.

Pusat konseling ini bersandar pada prinsip non-diskriminasi, responsif gender, perjuangan terhadap hak-hak anak, dan pembinaan keluarga sejahtera. Termasuk di dalamnya, pelayanan konseling untuk membantu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan

perundungan. Pusat konseling ini berusaha menjawab kebutuhan anak dan remaja milenial di zaman sekarang¹¹.

Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, akun media sosial berbasis internet turut diaktifkan untuk sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Contohnya, melalui akun instagram @puspaga.sby. Di era new media seperti sekarang ini, eksponen masyarakat, termasuk di dalamnya instansi pemerintah, memang perlu menjamah media sosial¹².

Inovasi ini merupakan Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif¹³. Ini adalah fasilitas bagi warga Surabaya untuk mendapat pembelajaran keluarga melalui psikoedukasi, konsultasi bagi anak, diskusi bagi orangtua, kuliah program pranikah¹⁴, dan perlindungan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat pula Kelas Parenting

¹¹Akhmad Ramidi & Ishak Hariyanto, *Generalisasi Bimbingan Konseling Pribadi Dan Sosial Untuk Remaja Di Era Milenial*. Al-Tazkiah, 7 (2), 154-166, 2018

¹²Rio Febriannur Rachman. *Menelaah Riuh Budaya Masyarakat di Dunia Maya*. Jurnal Studi Komunikasi. 1.2, 206-222, (2017).

¹³Surabaya.go.id. 2018. *Puspaga Sebagai Ruang Pencegahan Dini Sepert Masalah Keluarga*. Tersedia di <https://www.surabaya.go.id/id/berita/46097/puspaga-sebagai-ruang-pencegahan> di akses pada 24 Agustus 2019

¹⁴Khoirul Anam. *Analisis al-Maslahah al-Mursalah terhadap program sekolah pra nikah oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Surabaya*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

¹⁰Azmatul Husniyah. *Parenting Bagi Orang Tua Muda Di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya Perspektif Abdullah Nashihulwan*. Al-Hukama', 9.1, 172-194. 2019

Umum/Parenting Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tiap bulan. Seperti banyak dipahami, ABK maupun orangtua ABK perlu mendapat konseling yang memadai¹⁵. Juga, ada pula Konseling Kelompok, yang pesertanya merupakan klien yang telah melakukan konseling/konsultasi. Dengan cara ini, para klien bisa saling berbagi dan menguatkan. Makin hari, pusat konseling ini terus berbenah dan menambah jumlah konselor maupun sarana yang sudah ada¹⁶. Artinya, Pemerintah Kota Surabaya terus memantau dan melakukan terosan sehubungan dengan pelayanan ini.

B. Implementasi Kebijakan Konseling Pemerintah Daerah

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan menjalankan pusat konseling bagi anak dan remaja merupakan salah satu perwujudan kebijakan publik di level kota. Sejumlah pakar mendefenisikan kebijakan publik sebagai apapun yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan

oleh pemerintah, yang memiliki hubungan dengan masyarakat luas¹⁷. Kebijakan publik sudah barang tentu dilaksanakan oleh pemerintah secara legal, dengan resmi mengatasnamakan pemerintah¹⁸.

Keputusan pribadi pejabat publik yang tidak didasari oleh regulasi hukum, tidak termasuk kebijakan publik, meskipun memiliki dampak bagi masyarakat di lingkup tertentu. Kebijakan publik dijalankan oleh pemerintah, melalui aturan atau tatanan yang sah secara hukum. Lantas, didukung penuh oleh aparat pemerintah yang ada. Kemudian, berlangsung demi kemaslahatan umat.

Sebagian ahli menyimpulkan, terdapat tiga level hierarkis kebijakan publik: policy level, organizational level, operational level¹⁹. Umumnya, di negara demokrasi, policy level dilaksanakan yudikatif dan legislatif. Sedangkan organizational level diperankan pihak eksekutif. Ada pun operational level dijalankan satuan pelaksana di pemerintahan, baik itu kementerian,

¹⁵Supiartina & Rendra Khaldun, *Pendekatan Layanan Bimbingan Dan Konseling*. Al-Tazkiah, 7.1, 76-90, 2018

¹⁶Jawapos.com. 2019. *Pemkot Surabaya akan Rekrut 2 Psikolog.* Tersedia di <https://www.jawapos.com/jpg-today/05/01/2019/pemkot-surabaya-akan-rekrut-2-psikolog/> diakses pada 6 Juli 2019

¹⁷ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*. (New Jersey : Prentice Hall. 1972.)

¹⁸ James E. Anderson, *Public Policy Making*. (New York: Holt, Rinehart and Winston. 1984)

¹⁹Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung: AIP). 2006)

dinas, bagian, badan, dan lain sebagainya.

Pada pelaksanaan program di pusat konseling anak dan remaja, policy level dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, yang bersinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya. Bagaimanapun juga, anggaran tahunan untuk program di sana, mesti disahkan melalui rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam proses ini, tidak ada unsur yudikatif yang terlibat secara langsung, meski tetap menjadi pengawas eksternal.

Di organizational level, Pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Wali Kota Surabaya memegang peran penuh. Terlebih, Pemerintah Kota Surabaya memang memiliki perhatian khusus pada perkembangan anak dan remaja di kota ini. Sebab, mereka merupakan generasi penerus peradaban yang harus dipersiapkan fisik dan mentalnya. Tak ayal, ada banyak kebijakan yang berhubungan dengan mereka.

Ada pun di operational level, DP5A menjadi *leading sector* kegiatan. Meski dalam pelaksanaannya, ada sinergitas dengan pihak-pihak lain. Antara lain,

Dinas Kesehatan sebagai pihak apabila ada persoalan medis pada klien yang ditangani, dan Dinas Pendidikan, apabila diketahui anak dan remaja itu butuh attensi intensif dari sekolahnya. Selama ini, terjalin pula kerjasama dengan akademisi serta psikolog sebagai sukarelawan yang memberikan konseling, tatkala konselor di DP5A tidak dapat menyentuh semua klien dikarenakan keterbatasan jumlah personel.

Sedikitnya ada sebelas tahapan dalam proses operasional kebijakan publik, antara lain, perception/definition, aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation and adjustment/termination²⁰. Dari sebelas tadi, bisa dirangkum tiga tahap utama, yaitu, perumusan, implementasi, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan²¹. Tiga tahapan tadi menentukan efektifitas maupun efisiensi sebuah kebijakan.

Pada tahap perumusan, pembahasan pusat konseling anak dan

²⁰Charles O. Jones, *An Introduction To The Study of Public Policy*. (California: Brook/Cole Publishing Company. 1984), hal. 5.

²¹Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPPI. 2006), hal. 61.

remaja di Surabaya di internal Pemerintah Kota Surabaya. Yang kemudian, mendiskusikannya di meja rapat bersama DPRD Surabaya. Pada tahap implementasi kegiatan, DP5A menjadi esekutornya. Sedangkan evaluasi dilakukan secara bersama, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Legislatif melakukan evaluasi tahunan di rapat pembahasan APBD selanjutnya. Sedangkan evaluasi rutin dalam jangka yang lebih pendek, dilakukan di internal Pemerintah Kota Surabaya, langsung diawasi oleh Wali Kota Surabaya. Prinsipnya, evaluasi harus dilakukan berdasarkan monitoring berkelanjutan selama proses implementasi diterapkan²².

Sejumlah pakar menyebutkan kalau tahap implementasi merupakan yang paling penting. Di sana para eksekutor kebijakan, petugas lapangan, kemantapan organisasi, dan mekanisme procedural diuji. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan berdasarkan keputusan-keputusan sebelumnya, demi mencapai tujuan²³.

Implementasi inilah yang menjadi dasar adanya evaluasi. Dari rangkaian-rangkaian tadi, kebijakan publik bisa dianalisis, mengacu pada kebermanfaatannya di masyarakat. Salah satu teknik analisis yang sederhana, adalah dengan melihat sebelum dan sesudah inovasi dilaksanakan²⁴.

Upaya melihat kebermanfaatan program pusat konseling anak dan remaja di Surabaya ini bisa bertolak dari kondisi masyarakat terlebih dahulu. Juga, melalui pendetailan mengenai tujuan esensial program ini, yakni, membentuk keluarga yang sejahtera, kondisi sosial yang baik akan terbentuk. Bila dipandang melalui aspek sosial, masyarakat di Surabaya terbantu dengan adanya pusat konseling anak dan remaja. Terlebih, kebijakan ini tidak hanya membantu anak dan remaja yang ingin memerolah solusi atas problem mereka. Melainkan pula, menjadikan problematika keluarga secara umum sebagai sasarannya.

Yak tak kalah menarik, DP5A juga berkonsentrasi pada masalah ekonomi di keluarga tersebut. Bila memang yang

²²Sri Suwitri. "Konsep dasar kebijakan publik." *Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang* (2008), hal. 17.

²³Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses.* (Yogyakarta: Med Press, 2007), hal. 32.

²⁴William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hal. 12.

menjadi masalah adalah aspek ekonomi, instansi ini akan mengarahkan klien pada program-program Pemerintah Kota Surabaya yang berbasis penguatan ekonomi, baik yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang sudah terhimpun sejauh ini, jumlah klien relative banyak. Di tahun 2018, terdapat 339 klien yang melakukan konsultasi secara intensif. Sedangkan data hingga semester pertama 2019, mereka yang melakukan konsultasi intensif mencapai 314 klien. Ada pun pada 2018, jumlah mereka yang melakukan kunjungan tentatif (konsultasi namun tidak dalam kelompok intensif) mencapai 1.622 klien. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan tentatif pun mengalami peningkatan.

Kebijakan pusat konseling anak dan remaja ini memiliki layanan holistik dan bisa direplikasi di daerah lain²⁵. Secara prinsip, layanan di pusat konseling ini, juga diperlukan bagi masyarakat di daerah lain. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, dengan penguatan aspek

mental kejiwaan. Faktor penentu dan yang paling dibutuhkan dari realisasi program ini adalah komitmen dari pemerintah daerah, untuk bersama-sama pihak internal maupun eksternal, bersinergi mewujudkan program aplikatif tersebut. Sedangkan di aspek atau faktor anggaran, bisa disesuaikan dari anggaran yang sudah ada di dinas-dinas yang berkaitan dengan pos program yang ada.

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan program umumnya adalah memobilisasi Sumber Daya Manusia yang ada guna menjalankan apa yang telah digariskan. Hal itu bisa diwujudkan dengan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan memerlukan pengawasan. Juga, harus ada peran sentral Wali Kota sebagai orang nomor satu di pemerintah daerah, dalam menjalankan apapun kebijakan yang telah diformulasikan²⁶. Yang tak kalah penting adalah dukungan masyarakat dan pihak DPRD. Maka itu, dibutuhkan komunikasi yang terbuka, transparan, dan tepat untuk mensosialisasikan program ini.

²⁵Kedaulatan Rakyat. 2018. *Top Inovator Harus Tularkan Inovasinya*. Tersedia di https://krjogja.com/web/news/read/72249/Top_Inovator_Harus_Tularkan_Inovasinya diakses pada 25 Juni 2019

²⁶ Rio Febriannur Rachman. *Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya*. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 8.2, 273-292, 2019

C. Selaras Dengan Tujuan Pembangunan Sosial Berkelanjutan

Pembangunan sosial berkelanjutan menjadi sandaran perspektif tatkala pemerintah di tiap level, memutuskan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia untuk pembangunan sosial (World Summit on Social Development) yang digelar pada 1995 silam, di Kopenhagen, Denmark, terdapat tiga dimensi yang patut diperhatikan. Yakni, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan integrasi sosial²⁷. Suatu kebijakan bisa jadi tidak menyentuh tiga dimensi tersebut. Namun paling tidak, menyentuh satu di antaranya. Dengan catatan, ada kebijakan lain yang menyentuh dimensi lainnya.

Program pusat konseling anak dan remaja ini memiliki keterkaitan dengan integrasi sosial. Kadang kala, masalah yang menerpa anak dan remaja, membuat yang bersangkutan kesulitan membaur di masyarakat. Melalui penanganan menyeluruh yang ada di pusat konseling, mereka bisa diarahkan untuk kembali menyatu dengan masyarakat. Pada satu titik, bakal terjadi

integrasi sosial di kalangan anak dan remaja, oleh karena disparitas yang disebabkan keminderan atau kekurangpercayaan pada diri telah tergerus.

Bila mengacu standar yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat tujuh belas poin yang mesti diberi atensi, agar pemerintah bisa mewujudkan pembangunan berkelanjutan²⁸. Tidak harus sebuah kebijakan pemerintah, memiliki semua poin tersebut. Namun paling tidak, kebijakan tersebut mempunyai keterkaitan dengan salah satu poin. Dengan catatan, ada kebijakan lain yang berhubungan dengan poin-poin lainnya.

Tujuh belas poin yang dimaksud adalah *No Poverty* (memberantas kemiskinan), *Zero Hunger* (memberantas kelaparan), *Good Health and Well-Being* (memastikan kehidupan masyarakat sehat dan sejahtera), *Quality Education* (adanya pendidikan berkualitas), *Gender Equality* (kesetaraan gender), *Clean Water and Sanitation* (merealisasikan ketersediaan air higienis dan sanitasi yang layak), *Affordable and Clean Energy*

²⁷Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik*. (Bandung: CV Alfabet, 2014), hal. 27.

²⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2015. *About the Sustainable Development Goals*. Tersedia di <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>. Diakses pada 11 September 2018

(memudahkan akses energi dengan biaya terjangkau dan tanpa polusi), serta *Decent Work and Economic Growth* (pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan).

Selain itu, ada pula poin *Industry, Inovation and Infrastructure* (tersedianya infrastruktur yang mendukung industrialisasi produktif serta membantu pengembangan inovasi), *Reduced Inequalities* (menggerus ketidaksetaraan), *Sustainable Cities and Communities* (membangun kota dan komunitas yang berkelanjutan), *Responsible Consumption and Production* (mewujudkan pola konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab), serta *Climate Action* (berperan dalam isu perubahan iklim). Di samping itu, juga poin *Life Below Water* (kepekaan terhadap sumber daya yang ada di air), *Life on Land* (kepedulian pada sumber daya di daratan), *Peace, Justice, and Strong Institutions* (mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kekuatan institusi pemerintah), serta terakhir, *Partnership for The Goals* (kemitraan antar pihak demi tujuan kesejahteraan masyarakat).

Keberadaan pusat konseling anak dan remaja selaras dengan semangat *Good Health and Well-Being*. Alasannya,

terdapat cita-cita mewujudkan masyarakat yang sehat, khususnya sehat secara kejiwaan, dengan sasaran anak dan remaja sebagai generasi penerus bangsa. Kebijakan ini juga senada dengan keinginan merelisasikan pendidikan berkualitas atau *Quality Education*, terutama di aspek pendidikan mental anak dan remaja. Secara umum, terdapat pula upaya menggerus ketidaksetaraan atau *Reduced Inequalities*. Harapannya, semua anak dan remaja di Surabaya mendapat penanganan konseling yang baik.

Tatkala anak dan remaja sudah sehat secara kejiwaan, terdidik di aspek mental, serta setara dalam penanganan konseling, kota Surabaya dan komunitas di sana bisa hidup secara berkelanjutan. Maka itu, kebijakan ini bisa dianggap selaras dengan tujuan mewujudkan *Sustainable Cities and Communities*. Yang tak kalah menarik, dalam pelaksanaan kebijakan, terjadi sinergitas antar banyak pihak. Artinya, semangat *Partnership for The Goals*, sudah terimplementasikan. Di luar soal anak dan remaja, pusat konseling juga menangani problem perempuan dalam rumah tangga. Jadi, ada atensi pada *Gender Equality* atau kesetaraan gender.

Logikanya, perempuan dalam rumah tangga, seperti Ibu, bila hidup dalam situasi kondusif, akan mencetak anak dan remaja yang baik pula.

Dalam kebijakan pusat konseling anak dan remaja ini, ada sejumlah pembelajaran bagi pemerintah, maupun masyarakat Surabaya secara umum. Bagi pemerintah, terdapat pembelajaran tentang pentingnya sinergitas. Tanpa kebersamaan di internal Pemerintah Kota Surabaya, maupun eksternal Pemerintah Kota Surabaya, kebijakan ini tidak akan berjalan lancar. Sementara itu, pembelajaran yang bisa diambil oleh masyarakat secara umum, adalah kesadaran bahwa untuk mewujudkan tatanan yang baik dan sejahtera, butuh sumber daya manusia yang sehat mental serta fisik, di lingkup paling kecil. Yakni, dalam tiap individu di suatu keluarga. Keberadaan anak dan remaja tidak boleh dipandang sebelah mata dalam menyongsong masa depan sebuah komunitas maupun wilayah daerah.

D. Penutup

Sebagian ulama Islam, baik klasik ataupun kontemporer, menggariskan soal *maqâsid al-syâri'ah*, yang secara umum berkenaan dengan tujuan-tujuan dalam beragama yang hakiki. Yakni, adanya konsep perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masing-masing umat manusia. Bila ditelaah secara mendalam, keberadaan pusat konseling anak dan remaja memiliki keselarasan dengan konsep tersebut. Paling tidak, pusat konseling anak dan remaja di Surabaya, berupaya untuk memberikan perlindungan akal dan keturunan masyarakat.

Perlindungan akal dijalankan tatkala ada konseling pada anak dan remaja yang memiliki masalah. Khususnya, masalah mental dan kejiwaan mereka yang labil. Dalam program tersebut pula, problem rumah tangga dalam keluarga, yang umumnya sanggup memberi tekanan hidup sehingga akal sehat potensial terganggu, ikut didiskusikan hingga bertemu solusinya. Di sisi lain, perlindungan pada keturunan, dalam hal ini generasi penerus bangsa, yang diwakili oleh golongan anak dan remaja, jelas diberi perhatian secara intensif.

Kebijakan ini juga dapat dikaji dari aspek kebermanfaatan, untuk kemudian dinilai apakah layak dijaga keberlanjutannya atau tidak. Faktanya, terdapat sejumlah manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ditilik dari jumlah warga yang mendapatkan layanan, terdapat sekitar 1.622 klien di bidang konseling dalam tahun 2018. Sementara layanan yang diberikan makin variatif meliputi kelas parenting, pra nikah, dan lain sebagainya. Bila dihitung dari jumlah yang memanfaatkan layanan lain di luar konseling itu, jumlah klien mencapai 5.705. Angka ini mengindikasikan kebermanfaatan program. Meskipun memang, semua kebijakan publik tetap mesti dievaluasi serta dibenahi segala aspeknya agar jauh lebih optimal dampak positifnya di masyarakat.

Bila diperhatikan, dalam kebijakan pusat konseling anak dan remaja ini, terdapat mekanisme kemitraan. Yang melibatkan elemen di internal Pemerintah Kota Surabaya maupun di luar Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini memiliki kesesuaian dengan konsep kerjasama dalam Islam, yang memerintahkan umat untuk bersatupadu menyongsong laku

kebijakan. Umat manusia diberi perintah agar berjuang demi kebaikan dan kebenaran dalam barisan yang kuat serta teratur, sehingga masing-masing pihak dengan pihak lain tampak saling melengkapi, dan saling mengokohkan. Sebuah riwayat juga mencetuskan, pentingnya kebersamaan kaum muslimin, yang bersinergi dalam Al-Jamaah atau kelompok kebaikan, dan selalu menjauhi perpecahan atau tercerai berai karena itu melemahkan.

Kebijakan pusat konseling anak dan remaja di Surabaya ini adalah pelaksanaan terusan dari apa yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat, yang pada 2016 silam meminta Kabupaten/Kota membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di daerah masing-masing. Di tahun 2017, Pemerintah Kota Surabaya membentuk pusat konseling anak dan remaja, yang juga berkonsentrasi pada penanganan problem perempuan serta keluarga. Di dalamnya, terdapat Ruang Layanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), pengembangan peran Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) Kecamatan, dan sinergitas atau koordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya. Termasuk, pemerintah pusat dan kepolisian,

khususnya, dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Artinya, terdapat komunikasi intensif di antara sesama elemen pemerintah demi memajukan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arintoko, (2011). *Wawancara Konseling Di Sekolah*. Yogyakarta, ANDI
- Kartono, Kartini, (2017). *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. Jakarta, Rajawali Pers
- Mashudi, Farid, (2012). *Psikologi Konseling*. Yogyakarta, IRCiSoD
- Yeo, Anthony, (2010). *Konseling, Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah*. Jakarta, Libri
- Fitriana, H. (2019). *Peran Keterampilan Konselor (Counselor Skill) Sebagai Problem Solving Pada Permasalahan Remaja (Studi Literatur)*. Al-Tazkiah, 8.1, 17-28.
- Yusuf, Syamsul, (2016). *Konseling Individual, Konsep Dasar & Pendekatan*. Bandung, PT Refika Aditama
- Surabaya.go.id. (2017). *Resmikan Puspaga dan Convention Hall, Walikota Ajak Anak-anak Curhat Agar Terhindar Narkoba*, tersedia di <https://www.surabaya.go.id/id/berita/46097/puspaga-sebagai-ruang-pencegaha> di akses pada 24 Agustus 2019
- erita/24223/resmikan-puspaga-dan-convention diakses pada 25 Agustus 2019
- Prayitno & Erman Amti, (2013). *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Husniyah, Azmatul, (2019). *Parenting Bagi Orang Tua Muda Di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya Perspektif Abdullah Nashihulwan*. Al-Hukama', 9.1, 172-194.
- Ramidi, Akhmad & Ishak Hariyanto, (2018), *Generalisasi Bimbingan Konseling Pribadi Dan Sosial Untuk Remaja Di Era Milenial*. Al-Tazkiah, 7. (2), 154-166
- Rachman, Rio Febriannur, (2017). *Menelaah Riu Budaya Masyarakat di Dunia Maya*. Jurnal Studi Komunikasi, 1.2, 206-222.
- Surabaya.go.id. 2018. Puspaga Sebagai Ruang Pencegahan Dini Seputar Masalah Keluarga. Tersedia di <https://www.surabaya.go.id/id/berita/46097/puspaga-sebagai-ruang-pencegaha> di akses pada 24 Agustus 2019
- Anam, Khoirul, (2019). *Analisis al-Maslahah al-Mursalah terhadap program sekolah pra nikah oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di*

- Surabaya. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya
- Supiartina & Rendra Khaldun, (2018). *Pendekatan Layanan Bimbingan Dan Konseling*. Al-Tazkiah, 7.1, 76-90
- Jawapos.com, (2019). Pemkot Surabaya akan Rekrut 2 Psikolog. Tersedia di <https://www.jawapos.com/jpg-today/05/01/2019/pemkot-surabaya-akan-rekrut-2-psikolog/> diakses pada 6 Juli 2019
- Dye, Thomas R., (1972). *Understanding Public Policy*. New Jersey, Prentice Hall
- Anderson, James E., (1984). *Public Policy Making*. New York, Holt, Rinehart and Winston
- Tachjan, (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung, AIP
- Jones, Charles O., (1984). *An Introduction To The Study of Public Policy*. California: Brook/Cole Publishing Company
- Suwitri, Sri. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta, Med Press
- Dunn, William N., (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Kedaulatan Rakyat. (2018). Top Inovator Harus Tularkan Inovasinya. Tersedia di https://krjogja.com/web/news/read/72249/Top_Inovator_Harus_Tularkan_Inovasinya diakses pada 25 Juni 2019
- Rachman, Rio Febriannur, (2019). *Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya*. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 8.2, 273-292
- Suharto, Edi. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, CV Alfabeta
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2015). About the Sustainable Development Goals. Tersedia di <https://www.un.org/sustainable-development/sustainable-development-goals/>. Diakses pada 11 September 2018
- Mutakin, Ali., (2017). *Teori Maqâhid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19. 3, 547-570

Bagian Organisasi Pemerintah Kota Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Surabaya. (2019). *Inovasi Pelayanan Publik*. Surabaya: tidak diterbitkan.